

MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Oleh:
WITA ANGGRAENI
NIM. E21108087

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, tahun 2015

e-mail: thza_navy@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya, persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah, terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah, dan bak penampungan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak tidak mampu menampung tumpukan sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan saat ini masih belum maksimal. Contoh nyata dari bentuk kurang optimalnya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan kepada masyarakat yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan yang pada akhirnya mengakibatkan keindahan kota terganggu dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Menyikapi fenomena yang ada diharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya, terutama dalam hal hal memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Disamping itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan di Kota Kota Pontianak hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan akan kebersihan kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan kinerja dari aparat operasionalnya.

Kata-kata kunci : Mekanisme, Pengelolaan, Sampah

Abstract

The problem in this study is the lack of public awareness in creating a healthy environment. It is seen from littering habits is not in place, the public perception of waste management is still concentrated in the government, but the problem is the cleanliness of shared responsibility between the public and the government, limited land for collection and final disposal, waste transport and the limited funds, and waste tanks provided by the Department of Hygiene and Pontianak City is not able to accommodate the garbage heap. For more details can be seen in the following figure. The results showed that the waste management mechanisms contained in the District of South Pontianak is still not optimal. A concrete example of the form of less optimal hygiene services provided by the Department of Hygiene and Pontianak as a responsible public hygiene matters contained in the District of South Pontianak that ultimately resulted in the beauty of the city disrupted and can cause a variety of diseases that are harmful to human health. Responding to a phenomenon that is expected to Department of Hygiene and Pontianak in order to optimize its performance, especially in terms of terms of providing waste services to the community. Besides, Department of Hygiene and Pontianak as a responsible business in the city of Pontianak hygiene should further enhance the quality of hygiene services to the public will pay more attention to the performance of its operational forces ..

Keywords: Mechanisms, Management, Waste

A. PENDAHULUAN

Permukiman di perkotaan merupakan produsen sampah terbesar, kira-kira 60-70 % dari total timbulan sampah (Tuti Kustiah, 2005:3). Demikian juga halnya di Kota Pontianak, sumber sampah yang dominan berasal dari sampah rumah tangga (permukiman), yaitu mencapai 62% dari total jumlah sampah yang dihasilkan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 2010).

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup pasal 16 mengamanatkan bahwa masyarakat bertanggungjawab sebagai produsen timbulan sampah. Diharapkan masyarakat sebagai sumber timbulan yang beresiko sebagai sumber pencemar, untuk ikut serta dalam sistem pengelolaan sampah (Syafuruddin, 2004:1).

Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan reduksi sampah di sumbernya (rumah tangga). Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak membentuk *pilot project* pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tujuan *pilot project*

pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah untuk mendapatkan masukan bagaimana sampah rumah tangga dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat di tingkat sumber, sehingga dapat mengurangi jumlah volume sampah yang harus dikelola di TPA (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 2010).

Pengkajian mengenai pengelolaan sampah yang diujicobakan menjadi kajian yang sangat menarik dan strategis, sebagai sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Pontianak, terkait dengan jumlah sampah yang semakin meningkat. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka menemukan model yang paling tepat tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di perkotaan pada umumnya, dan Kota Pontianak pada khususnya.

Hingga saat ini sampah perkotaan masih menjadi masalah serius di Kota Pontianak. Beberapa indikasi permasalahan yang dihadapi dalam memecahkan masalah sampah ini antara lain disinyalir karena : pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Kedua, persepsi masyarakat

tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Ketiga, terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah. Dan keempat, bak penampungan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak tidak mampu menampung tumpukan sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dalam mewujudkan kebersihan lingkungan, oleh karena itu penulis memfokuskan masalah pada manajemen perencanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan secara deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian

yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala tersebut, namun belum memadai. Penelitian Deskriptif melukiskan (menggambarkan) sejumlah variabel yang berkaitan dengan permasalahan atau unit yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri Sipil di Dinas Kebersihan Kota Pontianak yang terlibat langsung dengan manajemen pengelolaan sampah. Penetapan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yakni pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
2. Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan
3. Tiga (3) orang staf kebersihan
4. Tiga (3) orang Tokoh Masyarakat yang ditentukan dengan teknik snowball (bola salju)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis “model interaktif”

tiga komponen analisis yaitu: Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara yang kemudian dianalisa berdasarkan item perwawancara. Adapun beberapa item wawancara tersebut diantaranya adalah:

1. Menurut pendapat Bapak, Bagaimana dengan kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan / Kelurahan Bapak/Ibu?

Kemunculan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Pontianak, memiliki relevansi dan korelasi yang kuat terhadap keterbatasan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak dimana mereka sudah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat setempat yang ditembuskan oleh Kecamatan kemudian melalui RT dan RT menyampaikannya kepada warga tentang kegiatan yang mereka rencanakan. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi jumlah sampah yang harus

dikelola dan menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat, mencerminkan adanya pergeseran pola pikir di dalam tubuh pemerintah mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah serta pemahaman terhadap peran maupun interaksi antara pemerintah dan masyarakat di dalamnya. “.....kita datang ke masyarakat dengan ide. Kita jelaskan kepada masyarakat alasannya dan kita ingin memberdayakan masyarakat. Masyarakat yang putus sendiri, buat rencana kegiatan. Kita lihat kesungguhannya, baru kita beri respon. Kita berperan sebagai fasilitator terhadap masyarakat.....” (Rasidiyanto, SE, Kabid. Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak).

2. Menurut pendapat Bapak, Bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak ?

Untuk proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, meliputi beberapa proses antara lain : Proses Pewardahan dan Pengumpulan Sampah, Pengangkutan serta Proses Pembuangan sampah ke TPA, hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala

Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak diketahui bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Pontianak, terdiri atas tiga tahap antara lain: Tahap Penampungan Sampah dan Pengumpulan Sampah, Tahap Pengangkutan Sampah dan Tahap Pembuangan Akhir Sampah. Hal ini sesuai dengan Sistem Manajemen Operasional Persampahan Kota Pontianak (2011 : 20).

Adapun tahap pertama dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak ialah mengumpulkan sampah dari berbagai tempat ke lokasi pengumpulan sampah dari berbagai tempat ke lokasi pengumpulan, sesudah itu diadakan pemisahan komponen sampah menurut jenisnya. Tahap pengumpulan sampah juga dapat diartikan sebagai kegiatan membawa sampah dari persil/bangunan ke lokasi pembuangan sementara.

Di Kota Pontianak, tempat penampungan sampah yang disediakan oleh masyarakat, beranekaragam hal ini disesuaikan dengan tingkat pendapatan dan kondisi kepadatan penduduk. Di setiap daerah memerlukan tong sampah dan keranjang sampah.

Untuk jenis tempat penampungan sampah yang berupa kantong plastik banyak digunakan oleh penduduk yang bermukim di

lorong-lorong, sedangkan keranjang atau tong sampah serta bak sampah kayu dan plastik dengan volume 20 sampai 40 liter banyak digunakan penduduk yang terdapat di jalan-jalan protokol seperti Jalan A Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan Tanjungpura dan Jalan Aliyang ataupun pusat-pusat pertokoan yang ada di wilayah pasar.

3. Bagaimana pola pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai Bapak dalam mengoptimalkan kinerja pegawai?

Untuk pengawasan pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan Pontianak Selatan, dilakukan oleh pihak Kecamatan Pontianak Selatan itu sendiri melalui camat yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Secara teknis operasional pengawasan pengelolaan sampah dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum. Seksi ini bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Pontianak Selatan. Setiap pelaksanaan pengelolaan sampah di masyarakat dilaporkan oleh kepala kelurahan masing-masing kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum yang kemudian dilaporkan kepada Camat untuk kemudian di teruskan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Kepala

Seksi Pelayanan Umum mempunyai wewenang untuk menindak dalam artian apabila ada pelanggaran yang terjadi secara langsung kepada masing-masing kepala kelurahan, bisa berupa teguran, *pressure* (tekanan), yang pada nantinya akan berpengaruh pada penilaian kinerja para lurah tersebut. Dan untuk mendukung kelancaran koordinasi dengan para lurah, masing-masing aparat mulai dari lurah sampai camat dibekali oleh alat komunikasi berupa HT (*handy talkie*) yang dipergunakan untuk melaporkan keadaan lapangan selama 24 jam. Alat ini sangat membantu kelancaran kerja masing-masing pihak, sehingga masalah persampahan yang ada dapat segera diketahui dan untuk selanjutnya ditanggapi. Oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga menempatkan petugas pengawas tingkat kecamatan ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Selatan. Pengawas untuk Kecamatan Pontianak Selatan mengawasi dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, hal ini dilakukan bukan dikarenakan kekurangan personil lapangan, melainkan karena fungsi

petugas pengawas ini bersifat tenaga tambahan, guna mengintensifkan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan Pontianak Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Pontianak Selatan dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan baik yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kecamatan Pontianak Selatan maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Kota Pontianak sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran kecil seperti keterlambatan pengangkutan sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jalannya kegiatan tersebut harus mendapat perhatian yang ekstra dari pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Adakah kendala-kendala yang ditemui dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan Bapak/Ibu ?

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak pada dasarnya semua jenis tempat penampungan sampah yang ada di seluruh wilayah Kota Pontianak diharapkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan yang dirasakan tokoh masyarakat karena sebagian besar sarana tempat

penampungan sampah yang ada dianggap kurang layak sebagai tempat penampungan sampah, selain itu kebiasaan masyarakat dalam hal membuang sampah tergolong masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya/sembarangan, sehingga menyebabkan banyaknya sampah yang menumpuk dan berserakan dimana-mana. Selanjutnya informan berharap tugas dan tanggung jawab masyarakat dalam tahap ini antara lain : membuang sampah pada tong yang telah tersedia tepat waktu sesuai aturan pihak pengelola, menggunakan fasilitas tong sampah secara optimal sesuai fungsi dan gunanya, menjaga dan memelihara keamanan serta kebersihan tong sampah yang berada di sekitar rumah secara rutin dan menjaga tong sampah selalu tertutup.

Faktor kendala utama disamping fasilitas yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak yaitu sangat minimnya kesadaran masyarakat pada pentingnya kebersihan lingkungan dan cara membuang sampah secara baik dan benar.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan saat ini masih belum maksimal. Sampah yang menumpuk sampai berhari-hari bahkan sampai berserakan dimana-mana (di pinggir-pinggir jalan) merupakan contoh nyata dari bentuk kurang optimalnya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan kepada masyarakat yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan yang pada akhirnya mengakibatkan keindahan kota terganggu dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Menanggapi temuan ini diharapkan mengoptimalkan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dalam hal hal memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat, sehingga dapat segera menyelesaikan masalah persampahan yang terjadi di masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan kualitas kinerja operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak yang didukung

oleh pengawasan yang ketat dan menyeluruh agar mekanisme pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat.

Temuan selanjutnya bahwa pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan belum dapat dikatakan berjalan dengan lancar, karena masih terdapat kendala-kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dalam mewujudkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Pontianak Selatan, hal ini dapat dilihat dari pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan masih kurang optimal. Di samping itu sarana pendukung kebersihan, keterbatasan personil, dana retribusi, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pontianak Selatan saat ini

Untuk itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan di Kota Kota Pontianak hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan akan kebersihan kepada masyarakat dengan lebih

memperhatikan kinerja dari aparat operasionalnya. Di samping itu hendaknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak segera melakukan penambahan sarana pendukung kebersihan serta mengadakan rekrutmen tenaga-tenaga baru guna mengatasi masalah keterbatasan personil operasional yang ada dan juga membentuk suatu Satuan Petugas Kebersihan Khusus yang anggotanya diambil dari organisasi kepemudaan yang terdapat di kawasan itu guna membantu aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dalam menangani secara cepat masalah pengangkutan sampah yang belum terangkut/tertangani agar proses pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon yang positif mengenai retribusi pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah.

E. REFERENSI

G.R Terry. 2001. **Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah**, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit bumi Aksara tahun 2001, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, **Pengantar Administrasi Pembangunan**, LP3S, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Pontianak, No. 15
Tahun 2005, **Tentang Ketertiban Umum**,
November 2005.

SK Wali Kota Pontianak No. 3 th 2000
**tentang Titik-Titik lokasi TPS di Kota
Pontianak**





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : WITA ANGGARAINI
NIM / Periode lulus : E21108087/III
Tanggal Lulus : 1 April 2013
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Thza_navy@yahoo.com / 082155644596

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTA PONTIANAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Yang ditandatangani dan disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Erdi, M.Si
NIP. 196703272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

WITA ANGGARAINI
NIM. E21108087

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)